

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.23 Tahun 2014, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber untuk pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mencari potensi kekayaan daerah, guna untuk meningkatkan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu tolak ukur yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan daerah serta penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber PAD adalah meneliti, menentukan serta menetapkan mana yang sebetulnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan cara mengelola sumber tersebut dengan baik untuk bisa memberikan hasil yang maksimal (Nur,ainy, dkk, 2013).

Hal ini sesuai dengan pandangan Siregar (2015:31), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintahan Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga meningkat (Tesyningrum, 2017).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sangat mengharapkan pemerintah daerah untuk memiliki kemandirian yang sangat besar dalam keuangan daerah, oleh sebab itu, peranan PAD merupakan bagian penting yang turut menentukan

kinerja keuangan daerah. Adapun pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah pada APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini dimana porsi antara PAD dengan sumbnagan pemerintah pusat sangat besar sehingga dapat dipastikan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki PAD yang sangat kecil dalam membelanjai kebutuhan daerahnya (Mahfudh et al., 2021)

Pembangunan daerah merupakan salah satu yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tiap daerah. PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, yang akan digunakan untuk membiyai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam rangka memaksimalkan PAD, pemerintah daerah berupaya untuk dapat mencari sumber-sumber pendapatan potensialnya, serta mengoptimalkan sumber PAD yang telah dipungut. PAD sangat penting dalam keberlangsungan ekonomi daerah serta berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Peranan PAD di dalam pemerintah daerah di seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah (Julastiana Yaneka dan & I, 2012).

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan PAD relative hampir sama. Meskipun dalam tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Akan tetapi dalam permasalahan peningkatan PAD masih ditemukan permasalahan yang hampir sama. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai target 37,8% dari total pendapatan tiap daerah. Tidak ada satupun daerah yang presentase PAD terhadap pendapatan daerahnya mencapai 70%. Ini bisa disimpulkan sebagian daerah belum bisa memperlihatkan kemandirian dan masih sangat bergantung pada bantuan pusat untuk membiayai segala kebutuhan yang terkait dengan pembangunan serta kebutuhan lainnya untuk kepentingan daerah.

Penyebab pertama, umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber yang merupakan pendapatan. Kedua, sebagian besar daerah masih belum bisa mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta belum bisa menerima hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ketiga, daerah masih beranggapan bahwa rendahnya PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang masih dibatasi untuk penerimaan. Keempat, daerah masih berfikir bahwa potensi yang dimiliki daerah terutama pajak daerah dalam hal pendapatan masih diatur oleh pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak rokok. Kelima, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Keenam, lemahnya pengawasan atas pelaksanaan dalam hal pemungutan pajak retribusi daerah.

Selain masalah di atas ada beberapa masalah lain yang yang dihadapi. Pertama minimalnya perhatian terhadap SDA yang ada di daerah Bengkulu sehingga pendapatan PAD yang mereka impikan kurang berjalan dengan baik (Nurhasanah & Maria, 2017). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, PAD dipengaruhi oleh PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), inflasi, jumlah penduduk, jumlah wisatawan dan pengeluaran pemerintah. Dipengaruhinya PAD oleh PDRB disebabkan oleh meningkatnya kemampuan membayar masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya memengaruhi peningkatan PAD (Santosa & Rahayu 2005). Sejalan dengan hasil Adriani & Handayani (2008); Aryanti & Indarti (2012); Gitaningtyas et al (2014); Henrikus (2016); Kumalawati (2016); PDRB berpengaruh negatif terhadap PAD karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Triani & Kuntari (2010).

Sampai saat ini Kabupaten Manggarai Timur mengalami PAD yang sangat menurun setiap tahunnya terlebih khusus dalam 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2017-2021. Menurunnya angka pendapatan yang dialami oleh Kabupaten Manggarai Timur ini disebabkan oleh beberapa hal, terlebih khusus pada tahun 2019-2021 dimana pada tahun tersebut mengalami Covid-19, yang menyebabkan ekonomi pada negara serta daerah sangat menurun drastis. Dalam beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan hasil PAD yang disebabkan oleh covid-19, yang mengakibatkan beberapa sumber daya alam serta sumber daya manusia tidak berjalan dengan baik. Sehingga pertumbuhan

ekonomi untuk daerah masih terhalang, karena masalah yang di akibat oleh covid-19 yang sangat membawa dampak buruk. Untuk tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena sumber –sumber PAD yang belum terlalu memadai, serta sumber daya alam yang juga belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Berikut akan disajikan perubahan PAD Kabupaten Manggarai Timur selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2017-2021

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2017	90.052.919.940,00	85.878.937.144,59	4.173.982.795,41	79.7
2018	49.507.713.692,00	44.007.083.306,34	-5.500.630.385,66	86.7
2019	61.873.667.471,00	54.434.731.623,57	-7.438.935.847,43	88.4
2020	50.088.575.306,00	47.552.521.548,90	-2.536.053.757,1	64.06
2021	66.415.544.870,00	44.168.186.981,80	-22.247.375.888,2	43.25

Sumber :Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kab. Manggrai Timur

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Manggarai Timur secara umum dari tahun ke tahun khususnya 5 tahun terakhir sangatlah menurun, tetapi pada tahun 2017 ada peningkatan, berbanding terbalik dengan 4 tahun setelahnya, sangatlah menurun yang disebabkan oleh covid-19. Jika dilihat pada tahun 2017 realisasi yang didapatkan adalah Rp. 85.878.937.144,71, jika dilihat tahun berikutnya sangatlah menurun 2018 Rp. 44.007.083.306,34 dan yang terendah juga terjadi pada tahun 2020 Rp. 47.552.521.548,57. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2019 yang dimana hampir seluruh dunia mengalami covid-19, pada saat terjadinya masalah tersebut ada beberapa Negara yang dilocdown secara menyeluruh termasuk Indonesia. Negara Indonesia

menghimbau kepada semua masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah untuk sementara waktu, sehingga membuat ekonomi masyarakat untuk beberapa tahun terakhir menurun, dan untuk membayar pajak retribusi dan pajak daerah masih terhambat. Dengan melihat masalah di atas bisa di katakan penurunan PAD di pengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah yang selama covid-19 menurun . Hal ini tidak terlepas dari peranan beberapa faktor yang ikut menentukan naik dan turunnya nilai penerimaan PAD

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tanda keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, semakin tinggi pertumbuhan dari suatu daerah maka semakin tinggi juga kesejahteraan masyarakat, meskipun ada indikator lain yaitu pemerataan pendapatan (Sukirno, 2019;421-422). Teori pertumbuhan ekonomi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti, pengeluaran pemerintah/belanja daerah, akumulasi modal, dan tenaga kerja.

Salah satu faktor yang dapat digunakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Santosa dan Rahayu (2005) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh PDRB dan Jumlah Penduduk. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republic Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Serta Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah (Nahumuri, 2019).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penerimaan pendapatan daerah diukur berdasarkan tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Peningkatan PDRB berarti juga peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dianalisis dengan menggunakan PDRB yang merupakan penjumlahan nilai bruto yang didapatkan dari semua kegiatan ekonomi yang terdapat di daerahnya dan dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain semakin tinggi PDRB dalam suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pembangunannya. Dengan kata lain semakin tinggi

PDRB per kapita rill dalam suatu daerah, semakin besar pula potensi dari sumber penerimaan daerah tersebut (Halim Abdu, 2001)

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah adalah Menurut pasal 1 angka 64 UU PDRD, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penelitian ini difokuskan pada masalah faktor apa saja yang dapat memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Timur, karena setiap daerah di Kabupaten Manggarai Timur memiliki berbagai macam kebudayaan, potensi serta ciri khas yang berbeda mulai dari pariwisata, perdagangan, sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang berbeda dan daya dukung yang lebih intensif sehingga berpeluang menghasilkan penerimaan daerah yang besar dan berbeda di setiap daerahnya.

Dalam rangka peningkatan PAD jika dilihat dari banyaknya potensi daerah Kabupaten Manggarai Timur yang bisa menghasilkan pemasukan yang cukup pada Pendapatan Asli Daerah. Pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berupaya sangat kuat untuk meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah

dengan cara menggali kembali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur yang berpotensi dapat meningkatkan PAD. Dan salah satu cara yaitu dengan mengoptimalkan kembali hasil pajak daerah serta retribusi daerah yang sudah ada. Hal ini dapat menyebabkan terdapat daerah yang maju dan juga daerah yang tertinggal, tergantung dari potensi yang dimiliki daerahnya dan bagaimana mengelola potensi tersebut untuk menghasilkan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Semua ini tidak terlepas dengan peranan beberapa faktor yang dapat menentukan naik dan turunnya nilai penerimaan PAD. Dalam hal ini potensi ekonomi dalam suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta jumlah penduduk.

Table 1.2
Data Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah

Tahun	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
2017	Pajak daerah	11.132.796.4998,00	11.141.191.998	+ 8.395.499	99,8
	Retribusi daerah	2.146.000.000,00	1.782.479.458	-363.520.542	84,44
	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	7.498.720.325,00	7.498.720.325		100
	Lain-lain pendapatan daerah	69.275.403.117,00	65.456.545.364	-3.800.857.753	94
2018	Pajak daerah	12.564.996.498,00	12.307.067.313	-257.929.185	97
	Retribusi daerah	2.002.125.000,00	1.615.985.576	-386.139.424	880,7
	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	8.762.717194,00	8.762.717.194		100
	Lain-lain pendapatan daerah	26.177.875.000,00	21.321.313.223	-4.856.561.777	81,4
2019	Pajak daerah	22.825.908.692,00	17.141.956.797	-5.683.951.895	75,05
	Retribusi daerah	2.139.125.000,00	2.554.533.221	+415.408.212	119,4
	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	9. 927.249.503,00	9.927.249.503,00		100
	Lain-lain pendapatan daerah	26.981.384.276,00	24.820.974.102	-2.160.410.174	94,82
2020	Pajak daerah	16.847.500.000,00	12.490.746.249	-4.356.753.751	74,1
	Retribusi daerah	2.293.975.000,00	2.868.218.118	+ 574.243.118	125,03
	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	10.437.225.306,00	10.437.225.306		100
	Lain-lain pendapatan daerah	24.509.875.000,00	21.756.331.876	-2.753.543.124	88,76
2021	Pajak daerah	27.475.843.962,00	12.312.478.128	-15.163.365.834	44,81
	Retribusi daerah	3.599.795.000,00	2.647.973.407	-951.821593	73,55
	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	10.261.866.180,00	10.261.866.180		100
	Lain-lain pendapatan daerah	25.078.039.728,00	18.945.869.267	-6.132.170.461	75,54

Sumber :Direktorat jenderal perimbangan keuangan Kab. Manggrai Timur

Pada tabel 1.2 menunjukkan fluktuasi upaya pajak daerah dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penurunan PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Semua ini disebabkan karena adanya pengaruh dari SDA dan SDM yang dimiliki masyarakat berkurang, semua itu diakibatkan oleh permasalahan yang baru-baru ini terjadi, yang mengakibatkan masyarakat belum mampu membayar pajak serta retribusi pajak. Menurut Kusuma (2016) dalam (Aisza et al., 2018) kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. Penerimaan Daerah juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penerimaan pemerintah pusat

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan berbagai faktor-faktor yang dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis tertarik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Timur dengan menjadikannya dalam hasil karya ilmiah dengan judul : ***“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019-2021.”***

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan pada PAD Kabupaten Manggarai timur pada tahun 2017-2021?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan pada PAD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017-2021?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan pada PAD Kabupaten Manggarai Timur?
4. Apakah Pajak Daerah berpengaruh signifikan pada PAD Kabupaten Manggarai Timur ?
5. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh signifikan pada PAD Kabupaten Manggarai Timur?
6. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PDRB, pajak daerah, dan retribusi daerah pada PAD?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap PAD Kabupaten Manggarai Timur.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Manggrai Timur

5. Mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Manggarai Timur.
6. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi para aparat pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Timur, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membantu serta menambah wawasan pustaka sebagai salah satu pengetahuan, khususnya dalam hal pengembangan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Timur.